

OPTIMALISASI HASIL KINERJA PEMERINTAHAN

Evaluasi OPD Tak Lagi Tiap Semester

YOGYA (KR) - Proses evaluasi dan penilaian kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Yogyakarta tidak akan lagi dilakukan tiap semester. Melainkan ditingkatkan hingga per caturwulan atau tiga kali dalam setahun.

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, mengungkapkan peningkatan evaluasi tersebut sebagai bagian dari upaya kontrol, penilaian, dan evaluasi atas capaian program dari tiap organisasi perangkat daerah. "Mulai tahun ini akan diberlakukan pemberian rapor tiga kali dalam satu tahun. Sebelumnya, memang ada pemberian rapor tetapi hanya sekali setahun atau tiap semester," jelasnya, Kamis (3/2).

Rapor yang akan diberikan ke tiap OPD berisi setidaknya empat indikator penilaian yaitu capaian fisik, serapan anggaran, capaian indikator sasaran, dan capaian indikator program. Menurutnya, dengan diberikan tiap empat bulan sekali maka pemantauan atas kinerja tiap organisasi perangkat daerah bisa dilakukan lebih baik.

Dengan begitu diharapkan mampu memastikan setiap organisasi perangkat daerah merealisasikan seluruh target atau rencana yang sudah disusun. Jika seluruh organisasi pe-

rangkat daerah di Pemkot Yogyakarta dapat memenuhi target kinerja yang sudah direncanakan, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap capaian kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Heroe menjelaskan, salah satu indikator capaian kinerja pemerintah daerah diukur dari beberapa aspek seperti indeks pembangunan manusia (IPM), dan gini ratio. "Untuk IPM Kota Yogyakarta pada 2021 mengalami kenaikan dibanding 2020 dan tetap berada di angka yang cukup tinggi," katanya yang menyebut IPM dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan angka kemiskinan.

IPM Kota Yogyakarta pada 2021 tercatat 87,18 sedangkan pada 2020 ada 86,61. Capaian IPM tersebut lebih tinggi dibanding angka nasional yang berkisar 72. Sedangkan untuk gini ratio, Heroe menyebut, juga semakin kecil sehingga jarak atau ketimpangan ekonomi semakin berkurang. Pada 2021, gini ratio

di Yogya 0,42. Namun angka tersebut belum sesuai target yang diharapkan yaitu di kisaran 0,39 dan belum sesuai dengan target RPJMD yaitu 0,38-0,41.

Sementara berdasarkan data Susenas periode Maret 2021, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta naik menjadi 7,69 persen atau naik 0,42 persen dibanding 2020. Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut belum sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 7,29-7,18 dan belum sesuai target RPJMD yaitu 7,29-6,32. "Pandemi dan ukuran garis kemiskinan yang meningkat menjadi beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan tersebut," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiyatmoko, mengatakan legislatif juga siap meningkatkan pengawasan kinerja dari tiap OPD untuk memastikan seluruh rencana yang disusun bisa dilaksanakan. Pihaknya akan meminta jajaran komisi untuk sering mengundang mitra kerjanya di eksekutif guna memastikan semua target kinerja dapat terealisasi.

"Paling tidak ketika ada hambatan yang dialami oleh OPD, maka kami di dewan juga bisa memberikan solusi," tandasnya. **(Dhi)-f**

PASTIKAN KEBIJAKAN DITERAPKAN SAMPAI LEVEL BAWAH

KPPU Lakukan Pengawasan Harga Minyak Goreng



M Hendry Setiawan menyerahkan cenderamata kepada Baskoro Jati Prabowo, usai silaturahmi.

YOGYA (KR) - Meski Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk harga minyak goreng, tapi dalam realita di lapangan belum sepenuhnya sama dan sesuai dengan harapan. Bahkan dalam beberapa kasus, ketika harga minyak goreng di beberapa lokasi sudah turun, stoknya justru langsung menipis. Menyikapi hal itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) VII DIY-Jateng terus melakukan pemantauan dan pengawasan.

"KPPU berharap harga pasar minyak goreng dapat sesuai hukum pasar dan tidak dipengaruhi adanya kartel atau kesepakatan akan tetapi hukum supply and demand. Untuk itu kami berharap berharap pemerintah mendorong pelaku usaha untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Karena KPPU khawatir kenaikan harga minyak goreng secara bersamaan dalam beberapa bulan terakhir tidak wajar. Apalagi hal ini tidak sifatnya nasional, jadi tidak hanya di satu daerah," kata Kepala Kantor Wilayah VII KPPU, M Hendry Setiawan.

Hal itu disampaikan saat bersilaturahmi dengan Direktur Produksi, PT BP Kedaualatan Rakyat Baskoro Jati Prabowo SSoS didampingi Pemred SKH Ke-

daulatan Rakyat, Octo Lampito MPd di kantor KR, Kamis (3/2). Pada silaturahmi itu Hendry Setiawan didampingi Yosi Extrada (staf kajian & advokasi) dan Agasty Amarrullah (staf administrasi).

Menurut Hendry, saat ada kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO), maka situasi itu dijadikan momentum untuk pelaku usaha minyak goreng pada perusahaan besar untuk menaikkan harga. Padahal seharusnya mereka yang pabriknya terintegrasi secara vertikal dengan kebun sawit, mendapat pasokan dari kebunnya sendiri. Sehingga idealnya harga minyak goreng mereka tidak terpengaruh harga CPO internasional.

Untuk mengatasi kenaikan itu pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Termasuk dengan melakukan operasi pasar tapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Begitu juga upaya penetapan harga oleh pemerintah dikhawatirkan hanya bagus dalam jangka pendek, namun di jangka panjang belum dapat menyelesaikan persoalan.

"Minyak goreng menjadi kebutuhan pokok yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Untuk itu perlu ada pengawasan supaya kebijakan pemerintah bisa diterapkan dengan baik di level bawah dan KPPU berusaha untuk melaksanakan hal itu," terangnya. **(Ria)-f**

2022, Sekitar 1.500 RS Harus Diakreditasi

YOGYA (KR) - Tahun ini terdapat sekitar 1.500 rumah sakit di Indonesia yang habis akreditasinya. Untuk itu Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARS) Muhammadiyah siap melakukan akreditasi dan siap diberi tugas berapa pun oleh Kementerian Kesehatan. Sekitar 500 calon surveyor siap melaksanakan tugas.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir, Direktur Utama PT Mentari Medika dr Slamet Budiarto SH MH MKes dan Ketua MKPU PP Muhammadiyah Dr Agus Syamsuddin MM mengemukakan hal tersebut dalam pertemuan pers di Hotel Inna Garuda, Kamis (3/2). Penjelasan disampaikan usai launching dan pelantikan pengurus LARS. Launching ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua PP Muhammadiyah didampingi pengurus



Ketum PP Muhammadiyah berfoto bersama usai launching LARS.

lainnya. Haedar mengemukakan, Indonesia ini harus membangun secara simultan. Di era teknologi ini penguasaan iptek hanya bisa dilakukan jika pendidikan tidak tertinggal. Dan pendidikan tidak tertinggal, bisa kesehatan masyarakatnya baik. "Dan tidak meningkat kualitas SDM kalau karakter warganya tidak tangguh," sebutnya. Dan Muhammadiyah dan organisasi yang

menyelenggarakan rumah-sakit dan kesehatan hanya selalu berikhtiar menjaga karakter bangsa yang secara simultan dengan berdasar pada pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini negara menurut Ketua PP Muhammadiyah dituntut dengan pelbagai regulasi dan ikhtiar yang diharapkan makin baik. Peningkatan APBN menurutnya harus disertai usaha langsung peningkat-

an kesehatan dan kualitas bangsa. "Partai politik juga harus memiliki komitmen kuat untuk membangun kesehatan bangsa dan masyarakat," tambah Haedar.

Disebutkan, LARS merupakan lembaga untuk mengakreditasi rumah sakit. Di negeri ini menurutnya terdapat sejumlah lembaga sejenis. Dan hal ini akan menjadikan proses demokratisasi dan dapat mencukupi keperluan akreditasi rumah-sakit khususnya swasta. Dengan demokratisasi ini akan ada keterbukaan dan good government. "LARS diharap bisa mewujudkan makin perkokoh pilar kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan dan usaha membangun kesehatan bangsa. Karena Indonesia masih harus berjuang keras membangun kesehatan bangsa," tandas Haedar Nashir. **(Fsy)-f**

Skuter Tak Boleh Beroperasi di Jalan Raya

YOGYA (KR) - Pemkot Yogyakarta hingga saat ini tengah menyiapkan aturan teknis menyangkut operasional skuter listrik di kawasan Malioboro. Akan tetapi sesuai aturan baku moda transportasi tersebut tidak diperbolehkan beroperasi di jalan raya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho, menyebut berdasarkan aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan sudah dijelaskan kondisi jalan yang bisa dimanfaatkan oleh alat transportasi jenis skuter listrik.

"Yang jelas kalau campur dengan lalu lintas lain di jalan raya dilarang," sebutnya, Kamis (3/2).

Pihaknya pun tidak memiliki kapasitas untuk melarang atau mengizinkan usaha persewaan skuter listrik yang saat ini cukup marak di kawasan Malioboro. Persoalan itu pun akan

segera dipayungi kebijakan guna memberikan jaminan kepastian legalitas dan keamanan semua pihak.

Agus menambahkan, jajarannya bersama kepolisian pun sudah rutin memberikan imbauan sekaligus menertibkan pengguna skuter yang memanfaatkan jalan raya.

"Seperti tadi malam bersama kepolisian lalu lintas kita sama-sama mengingatkan, tidak boleh kalau di jalan. Aturan itu harus dipahami," tandasnya.

Begitu juga pemanfaatan jalur pedestrian, sesuai aturan merupakan fasilitas bagi pejalan kaki. Sehingga jika digunakan untuk skuter menjadi kurang tepat. Apalagi jalur pedestrian di Malioboro cukup ramai dimanfaatkan oleh pengunjung.

Merujuk Permenhub Nomor PM 45, skuter dapat dimanfaatkan di jalur

sepeda serta jalur khusus yang disediakan. Sehingga tidak diperkenankan digunakan di jalan raya. Penggunaannya pun diatur yakni antara lain di kawasan permukiman, kawasan wisata, area perkantoran, car free day serta area di luar jalan raya. "Saya mohon pengertiannya agar semua menjaga keselamatan," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, meminta persewaan skuter listrik di kawasan Malioboro agar dihentikan sementara. Terutama selama proses perpindahan PKL menuju tempat baru yang telah disediakan oleh pemerintah. Selain itu pihaknya juga akan membatasi jumlah skuter listrik yang beroperasi dalam waktu tertentu. Di samping itu ke depan bakal dibuatkan lajur dan rute khusus yang terpisah dengan kendaraan bermotor. **(Dhi)-f**

UGM 10 Besar Dunia Kampus Paling Top di Instagram

YOGYA (KR) - Media sosial UGM kembali mendapat pengakuan dunia. Kali ini emplifi.io lembaga yang fokus dalam big data, digital marketing, branding, dan media sosial merilis hasil riset yang dilakukan terhadap interaksi di akun media sosial berbagai perguruan tinggi dunia.

Dari hasil riset terhadap interaksi di akun resmi Instagram, UGM masuk 10 besar bersama perguruan tinggi top dunia seperti Harvard University, Stanford University, dan The University of Oxford. "UGM adalah kampus satu-satunya yang masuk 10 besar dari Indonesia," kata Sekretaris Rektor UGM, Gugup Kismono PhD, Kamis (3/2).

Hasil riset ini dirilis di media sosial Emplifi pada akhir Januari lalu. Dari 10 perguruan tinggi teratas, tujuh di antaranya merupakan perguruan tinggi yang berlokasi di Amerika Serikat, sementara dua lainnya merupakan perguruan tinggi yang berlokasi di Inggris. "Tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri, bahwa UGM bisa bersaing dengan universitas papan atas yang na-

manya telah mendunia," ucap Gugup.

Ia menerangkan, pengelolaan laman dan media sosial semakin penting bagi institusi untuk pengembangan citra sekaligus sebagai bentuk adaptasi dalam melakukan komunikasi publik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan potensi yang besar bagi perguruan tinggi untuk memperluas jangkauan komunikasi publik dengan memanfaatkan beragam platform yang tersedia.

Dengan pengelolaan media sosial sebagai wahana penyampaian informasi diharapkan berbagai informasi penting bisa secara efektif menjangkau masyarakat luas. Untuk itu UGM hadir di kanal media sosial yang banyak diakses, mulai dari Instagram, Facebook, hingga TikTok, dengan ragam konten yang menarik sekaligus bermanfaat bagi publik.

Penggunaan ragam media sosial dilakukan untuk menjangkau kelompok audiens yang lebih beragam, terutama dari segi usia. "UGM akan terus beradaptasi dengan melakukan berbagai penyediaan penggunaan bauran media komunikasi. Dengan begitu informasi

yang disampaikan dapat semakin menjangkau generasi muda namun tidak meninggalkan generasi sebelumnya," kata Gugup.

Dalam daftar yang dirilis di awal 2022, UGM juga menduduki posisi pertama dalam pemeringkatan perguruan tinggi Indonesia terpopuler di media sosial versi 4 International College & Universities (4ICU) UniRank 2021, khususnya pada platform Facebook dan Instagram.

Dalam pemeringkatan tersebut UGM di peringkat pertama sebagai perguruan tinggi dengan jumlah like Facebook terbanyak dengan total mencapai 446.257 likes pada Februari 2021. Adapun jumlah rata-rata komentar per unggahan 3,34, rata-rata share 12,68 dan rata-rata reaksi per unggahan 263,14.

Pada platform Instagram, UGM masuk dalam peringkat tertinggi dengan jumlah pengikut atau follower mencapai 781.814 di akhir April 2021, sementara itu jumlah unggahan sebanyak 1.545. Jumlah pengikut akun Instagram UGM terus meningkat secara signifikan, dan hingga 31 Januari 2022 telah mencapai 869.737 pengikut. **(Dev)-f**

PP Muhammadiyah Kukuhkan Assessor SIRSMA

YOGYA (KR) - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membuat Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (SIRSMA). Tujuannya agar pelayanan yang diberikan oleh RS Muhammadiyah-Aisyiyah sesuai dengan nilai-nilai Islam yang Rahmatan Lil Alamin.

Untuk mendampingi RS Muhammadiyah-Aisyiyah agar layanan yang diberikan sesuai standar islami yang ditentukan, maka dibentuklah Assessor SIRSMA. Assessor ini dikukuhkan oleh Ketua PP Muhammadiyah, dr Agus Taufiqurrohmah SpS MKes di Amphitheater Gedung FK UAD Yogyakarta, Rabu (2/2).

Menurut Agus Taufiqurrohmah, Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah bercita-cita menjadi RS yang unggul, namun tetap memberikan pelayanan dengan nilai-nilai islami yang rahmatan lil alamin.

"Dari sisi keunggulan terus kita tingkatkan. Sedangkan agar pelayanannya islami dan dari hati maka kita bentuk SIRSMA



Pengukuhan Assessor SIRSMA oleh PP Muhammadiyah.

dan kita siapkan assessor untuk mendampingi rumah sakit," ujarnya.

Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, Dr Agus Samsudin MM menambahkan, di seluruh Indonesia ada sekitar 125 assessor yang dikukuhkan yang akan mendampingi RS Muhammadiyah-Aisyiyah dalam mengimplementasikan standar SIRSMA dalam pelayanannya.

Menurutnya, ada banyak standar yang diatur dalam SIRSMA, mulai pelayanan, perawatan hingga keuangan yang harus islami. "Contoh konkritnya, pasien laki-laki dan perempuan

dipisah. Saat persalinan/ibu melahirkan, maka perawat yang membantu dokter sebisa mungkin juga perempuan. Soal keuangan tentu harus non-riba yaitu melalui perbankan syariah," katanya.

Dengan terwujudnya pelayanan rumah sakit yang sesuai standar SIRSMA yang islami, diharapkan akan semakin menambah kepercayaan dan kenyamanan masyarakat (pasien).

"Dengan adanya SIRSMA ini maka pelayanannya akan terstandar, dan pasien juga menjadi lebih yakin dilayani secara islami," ujarnya. **(Dev)-f**